

**PENGARUH PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2025**

Putri Amelia Safitri¹, Andi Arman², Faidul Adziem³
^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar
[1safitrip571@gmail.com](mailto:safitrip571@gmail.com), [2andi.arman@unismuh.ac.id](mailto:andi.arman@unismuh.ac.id),
[3faidul.adzim@unismuh.ac.id](mailto:faidul.adzim@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) and Regional Levies on the Locally-Generated Revenue (PAD) of Kepulauan Selayar Regency during the period 2021-2025. The study is motivated by the substantial tourism potential of this archipelagic region, particularly the presence of Takabonerate National Park, which has not yet been matched by optimal realization of tax and levy revenues, resulting in a gap between tourism potential and its contribution to regional fiscal independence. This research employs a quantitative approach with a descriptive design, using secondary time-series data for 2021-2025 obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), the Regional Revenue Agency (BAPENDA), and the Central Statistics Agency (BPS) of Kepulauan Selayar Regency. Data were analyzed through classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (t-test and F-test) using IBM SPSS Statistics 29. The results show that PBJT has a positive and significant effect on PAD (sig. = 0.002), regional levies also have a positive and significant effect on PAD (sig. = 0.031), and simultaneously both variables significantly affect PAD (F = 331.985, sig. = 0.003) and explain 99.7 percent of the variation in PAD (R Square = 0.997). It is concluded that optimizing the collection of PBJT and regional levies is a key strategy for strengthening the fiscal independence of Kepulauan Selayar Regency.

Keywords: Specific Goods and Services Tax, Regional Levies, Locally-Generated Revenue, Fiscal Decentralization, Kepulauan Selayar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2025, yang dilatarbelakangi oleh besarnya potensi sektor pariwisata daerah kepulauan ini, khususnya keberadaan Taman Nasional Takabonerate, yang belum diimbangi dengan optimalnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD sehingga muncul kesenjangan antara potensi wisata dan kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan data sekunder berupa data time series periode 2021-2025 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dianalisis melalui uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis (uji t dan uji F) dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBJT

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, Retribusi Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,031, dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai F hitung sebesar 331,985 dan signifikansi 0,003 serta mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 99,7 persen ($R^2 = 0,997$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan PBJT dan retribusi daerah merupakan strategi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kata Kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kepulauan Selayar

A. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar penting penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tidak bergantung pada pemerintah pusat. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa daerah dengan otonomi yang lebih tinggi cenderung lebih mampu mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Lewis, 2003), sekaligus sejalan dengan prinsip good governance yang digagas World Bank (2018) tentang pentingnya

optimalisasi potensi ekonomi lokal guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat.

Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai salah satu kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 1.217 km² yang tersebar pada 18 pulau, memiliki potensi sektor pariwisata besar yang belum dikelola secara maksimal, terutama keberadaan Taman Nasional Takabonerate seluas 220.000 hektar, salah satu kawasan karang atol terbesar ketiga di dunia. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata berperan sebagai katalisator pertumbuhan melalui multiplier effect, di mana pengeluaran wisatawan mendorong aktivitas ekonomi pada sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan jasa (Archer, 2008; Dwyer & Forsyth, 2008). Namun, sepanjang periode 2021-2025 Kabupaten Kepulauan Selayar menghadapi

tantangan pemulihan pascapandemi COVID-19, sementara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masih tergolong rendah, yakni baru mencapai sekitar 60% dari target pada tahun 2022 (Dinas Pendapatan Daerah Kepulauan Selayar, 2023).

Terdapat kesenjangan (gap) yang jelas antara tingginya potensi pariwisata dan realisasi penerimaan PAD dari pajak serta retribusi daerah, yang dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan lemahnya pengawasan pemungutan retribusi. Secara teoritis, pajak yang progresif serta retribusi yang dikelola secara efisien dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan (Musgrave & Musgrave, 2010), dan sejalan dengan Fiscal Decentralization Theory of Federalism (Oates, 2007) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri guna memperkuat kapasitas fiskal secara mandiri.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu serupa. Sari dan Nugroho (2021) di Kabupaten Buleleng menemukan bahwa

optimalisasi pajak pariwisata mampu mendongkrak PAD hingga 20% melalui reformasi tarif dan digitalisasi pembayaran, meski belum menyentuh konteks kepulauan. Mamintada dkk. (2022) dan Lumongga dkk. (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara Tamyn dkk. (2025) di Kota Manado menunjukkan bahwa perubahan regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah turut memengaruhi pola penerimaan pajak dan retribusi. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang memadukan potensi pariwisata, kebijakan pajak dan retribusi, serta dampaknya terhadap PAD di daerah kepulauan seperti Kepulauan Selayar.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2025; dan (2) bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2025. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PBJT dan Retribusi Daerah,

baik secara parsial maupun simultan, terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021-2025. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis pada daerah kepulauan lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah berlandaskan filsafat positivisme untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, menggunakan data statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pengumpulan data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Data yang digunakan adalah data sekunder bersifat time series untuk periode 2021-2025 yang bersumber dari BAPENDA (data PBJT, Retribusi Daerah, dan PAD), BPS (data pendukung ekonomi daerah), serta LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, meliputi identifikasi sumber data, permohonan akses data resmi, pengumpulan data, validasi dan pembersihan data (termasuk penanganan missing values melalui interpolasi linier), serta penyimpanan data secara terenkripsi.

Variabel penelitian terdiri atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (X1) yang diukur dari pajak hotel, restoran, dan hiburan; Retribusi Daerah (X2) yang diukur dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu; serta Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai total penerimaan daerah dari sumber mandiri, seluruhnya diukur dalam skala rasio (rupiah) dan bersumber dari BAPENDA/LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik inferensial dengan bantuan IBM SPSS Statistics 29, meliputi uji asumsi klasik (normalitas Shapiro-Wilk,

multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF, heteroskedastisitas dengan uji Glejser, dan autokorelasi dengan Durbin-Watson), analisis regresi linear berganda dengan persamaan $Y = \beta_0$

+ $\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \varepsilon$, serta pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) pada taraf signifikansi (α) sebesar 0,05.

Tabel 1 Data PAD, PBJT, dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2025

Tahun	PAD (Rp)	PBJT (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2021	42.206.370.151,78	9.627.712.505,00	1.916.197.000,00	3,87%
2022	54.417.747.197,55	11.726.555.924,72	2.163.203.270,00	5,33%
2023	243.510.715.510,00	179.160.416.537,85	2.980.056.483,00	25,75%
2024	75.936.599.688,41	13.541.050.302,00	44.562.853.856,00	8,32%
2025	96.196.352.042,15	16.008.286.965,53	58.066.552.112,00	8,90%

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar, diolah peneliti (2026)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah kepulauan di ujung selatan Pulau Sulawesi yang memiliki potensi strategis pada sektor kelautan, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Berdasarkan Tabel 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi selama 2021-2025, meningkat dari Rp42,2 miliar (2021) menjadi Rp54,4 miliar (2022), mencapai puncaknya Rp243,5 miliar pada 2023, kemudian menurun menjadi Rp75,9 miliar pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp96,2 miliar pada 2025. Peningkatan PAD pada 2023 terutama didorong oleh lonjakan penerimaan PBJT,

sementara peningkatan pada 2024 dan 2025 lebih dipengaruhi oleh kenaikan Retribusi Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dipengaruhi oleh dinamika penerimaan PBJT dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun.

Uji validitas dengan korelasi Pearson Product Moment ($n=5$, $df=3$, $r_{tabel}=0,878$) menunjukkan hubungan PAD terhadap PBJT sebesar 0,975 (valid), sedangkan hubungan PAD terhadap Retribusi Daerah (-0,151) dan PBJT terhadap Retribusi Daerah (-0,362) berada di bawah r_{tabel} . Uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai 0,643 ($>0,60$) untuk ketiga variabel, sehingga data penelitian dinyatakan reliabel dan

layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	Nilai	Keterangan
Normalitas (Shapiro-Wilk)	Sig.	0,424	Berdistribusi normal
Multikolinearitas - PBJT	Tolerance / VIF	0,869 / 1,151	Tidak terjadi multikolinearitas
Multikolinearitas - Retribusi Daerah	Tolerance / VIF	0,869 / 1,151	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser) - PBJT	Sig.	0,306	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas (Glejser) - Retribusi Daerah	Sig.	0,405	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi (Durbin-Watson)	Nilai DW	2,469	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Output SPSS 29, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh uji asumsi klasik terpenuhi: data residual berdistribusi normal (Sig. Shapiro-Wilk 0,424 > 0,05), tidak terjadi multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk kedua variabel bebas), tidak terjadi heteroskedastisitas (Sig. uji Glejser > 0,05), dan tidak terjadi autokorelasi (nilai Durbin-Watson 2,469 berada pada rentang 1,5-2,5). Dengan demikian, model regresi linear berganda dalam penelitian ini layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan Y

= 33.916.977.528,272 + 1,159X₁ + 0,694X₂. Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila PBJT dan Retribusi Daerah bernilai nol, PAD diperkirakan sebesar Rp33.916.977.528,272. Koefisien regresi PBJT sebesar 1,159 dan Retribusi Daerah sebesar 0,694, keduanya bertanda positif, menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel tersebut akan diikuti oleh peningkatan PAD, dengan asumsi variabel lain konstan. Ringkasan hasil regresi dan pengujian hipotesis (uji t, uji F, dan koefisien determinasi) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien (B)	t / F hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	33.916.977.528,27	6,932	0,020	-
PBJT (X1)	1,159	25,470	0,002	Berpengaruh positif signifikan
Retribusi Daerah (X2)	0,694	5,576	0,031	Berpengaruh positif signifikan
Uji F (simultan)	-	331,985	0,003	Model signifikan
R Square / Adjusted R ²	0,997 / 0,994	-	-	Pengaruh sangat kuat (99,7%)

Sumber: Output SPSS 29, diolah peneliti (2026)

Nilai t hitung PBJT sebesar 25,470 dengan signifikansi 0,002 ($<0,05$) menunjukkan bahwa PBJT berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Nilai t hitung Retribusi Daerah sebesar 5,576 dengan signifikansi 0,031 ($<0,05$) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Secara simultan, nilai F hitung sebesar 331,985 dengan signifikansi 0,003 ($<0,05$) menunjukkan bahwa PBJT dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,997 yang berarti 99,7% variasi PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 0,3% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Fiscal

Decentralization Theory of Federalism (Oates, 2007) yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri guna memperkuat kapasitas fiskal secara mandiri, serta pandangan Musgrave dan Musgrave (2010) bahwa optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah diperlukan agar pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Temuan ini juga mendukung Teori Pertumbuhan Regional yang menyatakan bahwa sektor unggulan daerah, dalam hal ini pariwisata, dapat menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal, mendorong aktivitas perdagangan, transportasi, perhotelan, dan pelayanan publik yang pada gilirannya turut meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mamintada dkk. (2022) dan Lumongga dkk. (2023)

yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini juga diperkuat oleh Hamdani dan Hamzah (2025) di Kabupaten Probolinggo serta Kristina dan Ratnawati (2025) yang menegaskan peran penting pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kajian Saajidah dkk. (2025) di Kota Medan menekankan pentingnya digitalisasi dan perluasan basis pajak disertai revitalisasi retribusi berbasis kualitas layanan publik sebagai strategi memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan, sebuah temuan yang relevan mengingat kontribusi PBJT dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penelitian ini masih berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Meningkatnya PBJT pada tahun 2023 memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan PAD, sedangkan peningkatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan mulai optimalnya pengelolaan pelayanan dan fasilitas publik daerah. Namun demikian, tingginya nilai koefisien determinasi dalam penelitian

ini juga dipengaruhi oleh jumlah data pengamatan yang relatif sedikit (lima tahun), sehingga hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan data yang lebih luas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar (Sig. 0,002; koefisien 1,159); (2) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Kepulauan Selayar (Sig. 0,031; koefisien 0,694); dan (3) PBJT dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD (F hitung 331,985; Sig. 0,003) dengan kemampuan menjelaskan variasi PAD sebesar 99,7% ($R^2 = 0,997$).

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dan optimalisasi pemungutan pajak serta retribusi daerah, misalnya melalui digitalisasi pembayaran pajak hotel, restoran, dan hiburan mengikuti model Kabupaten Buleleng, serta perluasan

basis retribusi objek wisata khususnya di Taman Nasional Takabonerate yang masih under-optimized, disertai penguatan pengawasan wajib pajak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan data yang lebih panjang dan menambahkan variabel lain agar hasil penelitian lebih akurat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, B. (2008). Tourism and economic growth: A multiplier analysis. *Journal of Travel Research*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. (2022-2025). *Kepulauan Selayar Dalam Angka*. BPS Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. (2023). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022*.
- Dwyer, L., & Forsyth, P. (2008). Economic measurement of tourism. Dalam A. Lockwood & S. Medlik (Ed.), *Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy*. CABI.
- Hamdani, & Hamzah. (2025). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Nasional Tahun 2022*.
- Kristina, & Ratnawati. (2025). Pengaruh pajak daerah terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*.
- Lumongga, Warongan, J. D., & Korompis, C. W. (2023). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Studi dan Bisnis Riset*.
- Mamintada, Rondonuwu, & Pinatik. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Equilibrium*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2010). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Erlangga.
- Oates, W. E. (2007). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*.
- Saajidah, A., Sari, G., Sihombing, T. E. O., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2025). Analisis perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, Pendapatan Asli Daerah: Studi kualitatif deskriptif di Kota Medan tahun 2011-2025. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*.
- Sari, & Nugroho. (2021). *Optimalisasi pajak pariwisata di Kabupaten Buleleng*, Bali.
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tamyn, L. I., Warongan, J. D., & Korompis, C. W. (2025). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 428-438.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- World Bank. (2018). *Good governance and fiscal decentralization*.